

## **EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM KETAHANAN PANGAN**

Rosa Hutahaean<sup>1</sup>, Timbul Dompok<sup>2</sup>  
Universitas Putera Batam<sup>1,2</sup>  
pb201010023@upbatam.ac.id

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Batam dalam menanggapi keamanan pangan di dalam kota tersebut. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dan kualitatif untuk penelitian. Hasil penelitian mengidentifikasi kelurahan-kelurahan seperti Batu Legong, Temoyong, dan Bulang Lintang sebagai prioritas utama yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah. Sarana dan prasarana pangan di kelurahan-kelurahan ini perlu diperkuat melalui alokasi sumber daya dan anggaran yang memadai. Selain itu, evaluasi mendalam juga perlu dilakukan terhadap kondisi infrastruktur pangan di kelurahan dengan tingkat rentan yang lebih rendah. Program-program bantuan pangan yang berkelanjutan dan kolaborasi dengan sektor swasta serta masyarakat sipil menjadi langkah strategis dalam meningkatkan ketahanan pangan secara menyeluruh. Penyuluhan dan edukasi gizi kepada masyarakat juga penting untuk meningkatkan pemahaman akan pola makan sehat. Simpulan, bahwa 33 kelurahan Kota Batam dimana masih adanya kekurangan pada sarana dan prasarana dalam menyediakan pangan.

Kata Kunci: Indikator, Konsep Keamanan Pangan, Kebijakan Publik

### **ABSTRACT**

*This study aims to examine the policies implemented by the Batam City Government in responding to food security in the city. The research method used is descriptive and qualitative for the study. The results of the study identified sub-districts such as Batu Legong, Temoyong, and Bulang Lintang as the main priorities that require serious attention from the government. Food facilities and infrastructure in these sub-districts need to be strengthened through adequate allocation of resources and budgets. The audience, as key stakeholders, play a crucial role in implementing these recommendations. In addition, an in-depth evaluation also needs to be carried out on the condition of food infrastructure in sub-districts with lower levels of vulnerability. Sustainable food assistance programs and collaboration with the private sector and civil society are strategic steps in improving overall food security. Nutrition counseling and education to the community are also important to improve understanding of healthy eating patterns. The conclusion is that 33 sub-districts in Batam City still lack facilities and infrastructure to provide food.*

*Keywords: Indicators, Food Security Concept, Public Policy*

## **PENDAHULUAN**

Ketahanan pangan merupakan salah satu paradox yang dimana menjadi penemuan di masa dunia modern saat ini. Peranan dalam sector pertanian di Indonesia merupakan salah satu yang sangat penting yang dimana dapat dilihat dari kewajiban dalam menyiapkan ketersediaan kebutuhan pangan penduduk yang ada pada tahun 2005 yang di mana terdapat berjumlah dengan 219,3 juta, serta diprediksikan akan selalu bertambah menjadi 1,25 persen (Purwaningsih, 2008; Saliem & Ariani, 2016). Maka dengan demikian pemerintah wajib melaksanakan kebijakan pangan yang diimana dapat menjamin dalam ketahanan pangan, kelembagaan, serta organisasi pangan. Kebijakan tersebut merupakan keperluan dalam peningkatan sebuah kemandirian pangan .

Dalam pertumbuhan pangan merupakan salah satu bagian dari sebuah hitungan dalam pertumbuhan penduduk menjadi tolak ukur. Bangsa Indonesia dimana dengan pertumbuhan penduduk yang positif, dimana apabila tidak dapat disertai dengan kenaikan sebuah produksi pangan maka akan sangat berpengaruh dalam berpeluangnya dalam menghadapi sebuah persoalan pemenuhan dalam kebutuhan pangan terhadap penduduknya di masa yang akan datang. Kebutuhan pangan akan senantiasa dalam peningkatan, dimana seiring dengan peningkatan dalam jumlah penduduk. Didalam tingkat pemenuhannya tidaklah semua pada kebutuhan pangan akan dapat dipenuhi , dimana disebabkan karena adanya sebuah kapasitas dalam produksi serta distribusi pangan yang hanya semakin terbatas. Sehingga dapat mengakibatkan dalam ketidakstabilan dalam sebuah kebutuhan serta dalam pemenuhannya dengan secara nasional. Isu ketahanan pangan merupakan salah satu yang menjadi persoalan dan topil yang sangat penting, karena pangan adalah sebuah kebutuhan yang dimana menjadi paling hakiki dalam menentukan kualitas pada sumberdaya manusia serta dalam stabilitas sosial politik yang akan menjadi sebuah persyaratan dalam melaksanakan sebuah pembangunan. Maka dengan demikian peran pemerintah merupakan sangatlah penting dalam masalah pangan, dan apalagi rata -rata pengeluaran dalam rumah tangga dalam sebuah pangan masih terdapat diatas 60 persen. Di Indonesia berkomitmen dalam mengwujudkan ketahanan pangan dimana telah tertulis di dalam undang – undang no 7 tahun 1996, dimana yaitu mengenai tentang pangan serta Peraturan pemerintah Republik Indonesi (PP) No 68, yakni mengenai ketahanan pangan , ketahanan pangan dapat diartikan yaitu sebagai kondisi terpenuhinya pangan disetiap bagian rumah tangga yang telah tercermin pada ketersediaan pangan yang cukup, baik dengan jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau (Ariani, 2004).

Dalam pengelolaan program ketahanan pangan dengan secara efektif , maka perlu sebuah informasi tentang ketahanan pangan yang jelas dan akurat dimana dengan tertat dengan baik, demi untuk melakukan yang terkait dengan ketahanan pangan, Maka dengan itu perlunya adanya sebuah upaya dalam menentukan target intervensi dalam sasaran geografis. Dimana salah satunya adalah upaya dalam memenuhi sebuah ketersediaan informasi yang dimana mengenai tentang kondisi ketahanan pangan, serta dilaksanakannya sebuah monitoring dikondisi ketahanan pangan diwilayah. Secara umum di Kota Batam dimana akibat adanya kerawanan pangan dimana akan dapat mempengaruhi dengan beberapa indikator (Ilham et al., 2016). Dimana indikator - indikator yakni menjadi indicator termasuk pada penyusunan FSVA Kota Batam yang dimana merupakan warung / toko kelontong, serta perentasee yang terdapat pada rata – rata penduduk yang hidup di angka kemiskinan. Informasi mengenai tentang ketahanan pangan sangatlah penting dalam memberikan sebuah informasi kepada para pembuat dan kebijakan , baik ditingkat pusat ataupun ditingkat local , yang dimana lebih untuk

memprioritaskan dalam intervensi dan program yang berdasarkan kebutuhan serta potensi dampak kerawanan pangan yang tinggi. Informasi akan dapat dimanfaatkan dimana sebagai salah satu instrument untuk mengelola krisis pangan baik dengan jangka pendek ataupun menengah serta Panjang.

Maka dengan demikian, pada urgensi data dan gosip tentang ketahanan pangan, seharusnya komprehensif, jelas, akurat, dan nyata dimana menjadi salah satu yg akan menjadi dasar bagi para penghasil keputusan serta pada penetapan kebijakan, serta acara intervensi serta lokus program yg baik ditingkat sentra ataupun di taraf wilayah , salah satunya di Kota Batam . dan dalam pengelolaan program ketahanan pangan yang efektif , maka sangat diharapkan informasi yang ketahanan pangan yg jelas , seksama, serta terstruktur menggunakan baik, dimana untuk dapat menjalankan intervensi yang berhubungan menggunakan ketahanan pangan.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian dalam sebuah artikel ini yaitu menggunakan metode deskriptif dan kualitatif . dengan menggunakan metode kualitatif yaitu salah satu metode yang dimana menggunakan pedoman dalam penelitian kemudian akan mendaptkan atau menghasilkan sebuah data yang deksriptif yang dimana dalam bentuk tulisan atau ucapan dan prilaku dari orang – orang yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif ini diharapkannya mampu memberikan sebuah pemaparan yang dimana adanya terdapat dalam tulisan , ucapan, tindakan , yang dapat diamati dari seseorang atau masyarakat serta dalam organisasi -organisasi serta dalam keadaan yang dimana terdapat pada suatu kelompok masyarakat yang kemudian dapat dikaji sari sebuah sudut pandang dengan utuh , serta menyeluruh. Dalam penelitian ini dimana dalam penulisan artikel ini menggunakan dua macam sumber data yang digunakan , yaitu sebuah data skunder dan data primer. Data primer yaitu data yang dimana diterima secara langsung dengan sumber yang aslinya atau dimana informasi tersebut dengan secara langsung. Dan untuk data skunder yaitu dimana data tersebut didapatkan dari berbagai sumber dari buku – buku atau artikel, dan jurnal. Untuk data tersebut diperoleh dengan website yaitu dinas kota batam atau berita- berita dari media massa kota batam.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Isu terhadap ketahanan pangan yang dimana merupakan menjadi sebuah topik yang sangat penting dimana kerana pangan adalah sebuah kebutuhan yang dimana paling hakiki yang dapat menentukan pada sebuah kualitas sumberdaya manusia serta pada stabilitas sosial dan politik dimana merupakan yang menjadi salah satu sebagai persyaratan dalam melaksanakan pada pembangunan, maka oleh karena itu pemerintahan sangatlah penting dalam masalah pangan. Di Kota Batam dimana dengan adanya jumlah pada kelurahan yang dimana termasuk prioritas 1-3 yaitu berjumlah 33 kelurahan dari 64 kelurahan. Adapun kelurahan yang dimana menjadi prioritas, kelurahan Kota Batam di klasifikasikan dimana terdapat menjadi 6 kelompok ketahanan pangan serta gizi yang dimana menyebabkan pada situasi ketahanan pangan dan gizi, Kelurahan di Prioritas 1, 2 serta 3, Prioritas1 dimana wilayah yang merupakan menjadi rentan pangan tinggi yang dimana terdapat diwilayah Kelurahan Batu Legong, kelurahan Temoyong ,kelurahan Bulang Lintang , sedangkan pada Prioritas 2 adanya rentan pangan sedang yaitu wilayah kelurahan kasi, Sekanak Raya , Pantai Gelam, Pulau Setokok, Subang mas serta Air Raja, kemudian Prioritas3 rentan pangan renda yaitu wilayah di Pulau Terong, Pemping, Temoyong , Pulau Abang, Pulau abangm

Karas serta Sembulang dan Galang Baru. Maka hal tersebut dikatakan bahwa 33 kelurahan Kota Batam dimana masih adanya kekurangan pada sarana dan prasarana dalam menyediakan pangan. maka indikator pada sarana serta prasarana dalam penyediaan pangan di Kota Batam yaitu dimana adanya jumlah warung / toko kelontong.

Maka dengan demikian adanya sebuah rekomendasi pada kebijakan ketersediaan pangan di Kota Batam yaitu ;

1. Adanya buat menaikkan serta menjaga pada ketersediaan pangan maka memakai demikian perlu adanya pada melakukan kerja sama Government ke Government terhadap daerah pusat produksi yang diluar Kota Batam dimana akan kontinuitas pada ketersediaan pangan serta mengklaim juga stabilisasi harga terkendali .
2. Adanya dalam memastikan dalam persediaan pangan dimana dengan adanya pengembangan diberbagi potensi pada pasar pangan yang dimana dengan mengembangkannya, dengan melalui toko/ warung pangan di Kota Batam.
3. Menyediakan dengan banyak sekali wahana dan prasarana ekonomi di pangan di Kota Batam dimana terutama di pada rangka pemenuhan kebutuhan serta ketersediaan pangan.
4. Serta adanya peningkatan dalam pengawasan yaitu rantai pasok komoditas pangan dimana guna menjaga pada ketersediaan pasokan pangan.

Selain adanya kebijakan pada ketersediaan pangan di Kota Batam, namun terdapat juga rekomendasi pada kebijakan dalam peningkatan masyarakat terhadap akses pangan yaitu :

1. bisa memastikan di harga pangan dimana bisa dijangkau pada semua lapisan dimasyarakat menggunakan melalui stabilisasi pada harga pangan serta menekankan di inflasi wilayah , bila Bila diperlukan maka akan diberikan bonus serta banyak sekali jaring dalam pengaman sosial di tempat tinggal tangga yg dimana sangat prihatin.
2. lalu pada mempertinggi pada upah rill di Kota Batam yaitu menggunakan melalui peningkatan di nilai tambah industri di pengolahan dan pada daya saing terhadap produk di pasar ekspor.
3. lalu dalam memperluas di lapangan kerja yang tidak mengecewakan yang mulai padat yg dimana adanya karya terutama dakam memanfaatkan sumberdaya lokal yg dimana masih belm mengoptimalkan , dimana seperti penguatan industri kreatif , dan perundangan dalam pariwisata.
4. Pemerintahan Daerah di Kota Batam maka perlu adanya sebuah laksanakan pada melakukan penanggulangan kemiskinan yang dimana seperti yang termuat pada RPJMD Kota Batam pada tahun 2016-2021 yang dimana didalamnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dalam meningkatkan pada ketersediaan lapangan kerja yang dimana bertujuan agar dapat menyerap rumah tangga retan miskin, serta pada peningkatan pada sebuah pendapatan serta penurunan pada angka kemiskinan dan tingkat pengangguran.
5. Adanya peningkatan pada kesejahteraan yang sosial pada masyarakat yang dimana khususnya dalam Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
6. Adanya pelaksanaan dalam melakukan penguatan pada lembaga latihan kerja serta pada pemberian atau pelaksanaan pada sertifikasi supaya dapat memenuhi standar akreditasi.
7. Adanya perlu peningkatan pada kualitas sarana serta prasarana ketenagakerjaan , serta adanya kompetensi tenaga kerja .

Maka dengan demikian kebijakan pada ketahanan pangan di Kota Batam yaitu untuk mengarahkan dan memberikan kepada arah kebijakan yang dimana akan lebih jelas serta akan mudah dilaksanakan oleh pemerintah yang berperan dalam menjabarkan dengan secara rinci kebijakan – kebijakan yang dimana mampu memberikan insentif konsumen dengan cara komprehensif dari hulu sampai ke hilir (Dewan Ketahanan Pangan, 2009).

Hasil penelitian Danil (2024) menunjukkan bahwa dari enam indikator efisiensi, kecukupan, pemerataan, daya tanggap, dan ketepatan sudah cukup baik. Sedangkan efektivitas pencapaian target masih belum tercapai sebanyak 100 ton ekuivalen beras. Adapun kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kebijakan berlangsung adalah kurangnya sarana maupun prasarana khususnya pabrikasi beras, dominasi pedagang dalam jual beli, dan anggaran yang terbatas. Upaya-upaya yang dilakukan diantaranya dengan menjalin kerja sama dalam menyediakan sarana dan prasarana, memberikan insentif petani dan pedagang, serta melakukan perencanaan ulang untuk optimalisasi anggaran yang akan digunakan. Penelitian Kurnia et al., (2020) menemukan bahwa implementasi kebijakan cadangan pangan nasional telah dievaluasi berdasarkan aspek komunikasi, sumber daya, niat positif, dan struktur administratif. Terdapat koordinasi yang sudah dilakukan dengan berbagai Kementerian dan lembaga yang memiliki kewenangan terkait cadangan pangan. Distribusi cadangan pangan kepada masyarakat dilaksanakan melalui program bantuan social dan para pelaksana menunjukkan dedikasi terhadap tugas mereka, serta pengawasan dilakukan baik secara langsung maupun melalui sistem online. Selain itu, prosedur operasional standar (SOP) telah diterapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **SIMPULAN**

Isu terhadap ketahanan pangan yang dimana merupakan menjadi sebuah topik yang sangat penting dimana karena pangan adalah sebuah kebutuhan yang dimana paling hakiki yang dapat menentukan pada sebuah kualitas sumberdaya manusia serta pada stabilitas sosial dan politik dimana merupakan yang menjadi salah satu sebagai persyaratan dalam melaksanakan pada pembangunan, maka oleh karena itu pemerintahan sangatlah penting dalam masalah pangan. Adapun kelurahan yang dimana menjadi prioritas, kelurahan Kota Batam di klasifikasikan dimana terdapat menjadi 6 kelompok ketahanan pangan serta gizi yang dimana menyebabkan pada situasi ketahanan pangan dan gizi, Kelurahan di Prioritas 1, 2 serta 3, Prioritas 1 dimana wilayah yang merupakan menjadi rentan pangan tinggi yang dimana terdapat diwilayah Kelurahan Batu Legong, kelurahan Temoyong, kelurahan Bulang Lintang, sedangkan pada Prioritas 2 adanya rentan pangan sedang yaitu wilayah kelurahan kasi, Sekanak Raya, Pantai Gelam, Pulau Setokok, Subang mas serta Air Raja, kemudian Prioritas 3 rentan pangan renda yaitu wilayah di Pulau Terong, Pemping, Temoyong, Pulau Abang, Pulau abangm Karas serta Sembulang dan Galang Baru. Maka hal tersebut dikatakan bahwa 33 kelurahan Kota Batam dimana masih adanya kekurangan pada sarana dan prasarana dalam menyediakan pangan, maka indikator pada sarana serta prasarana dalam penyediaan pangan di Kota Batam yaitu dimana adanya jumlah warung / toko kelontong. Adapun kelurahan yang dimana merupakan menjadi salah satu prioritas 1 yaitu kelurahan pantai Galang, Temoyong dari Sekanank Raya, dimana Kelurahan – kelurahan perlu adanya perhatian yang sangat serius serta fokus pada menangani pada keberadaan pada sarana serta prasarana pangan supaya pasokan pangan akan lebih adanya jaminan, serta aman dalam mencakup kebutuhan pangaan masyarakat.

## SARAN

Penelitian ini menyoroti urgensi isu ketahanan pangan di Kota Batam, terutama pada kelurahan-kelurahan yang menjadi prioritas karena tingkat rentan yang tinggi terhadap kekurangan pangan dan gizi. Temuan penelitian mengidentifikasi kelurahan-kelurahan seperti Batu Legong, Temoyong, dan Bulang Lintang sebagai prioritas utama yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah. Sarana dan prasarana pangan di kelurahan-kelurahan ini perlu diperkuat melalui alokasi sumber daya dan anggaran yang memadai. Selain itu, evaluasi mendalam juga perlu dilakukan terhadap kondisi infrastruktur pangan di kelurahan dengan tingkat rentan yang lebih rendah. Program-program bantuan pangan yang berkelanjutan dan kolaborasi dengan sektor swasta serta masyarakat sipil menjadi langkah strategis dalam meningkatkan ketahanan pangan secara menyeluruh. Penyuluhan dan edukasi gizi kepada masyarakat juga penting untuk meningkatkan pemahaman akan pola makan sehat. Dengan sistem pemantauan dan evaluasi yang kuat, diharapkan upaya-upaya ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap ketahanan pangan dan gizi masyarakat Kota Batam, serta memperkuat fondasi untuk pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial yang berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ariani, M. (2004). Penguatan Ketahanan Pangan Daerah untuk Mendukung Ketahanan Pangan Nasional. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. *IHSN International Household Survey Network*, 1999(70), 23–37. <http://blog.ub.ac.id/dipoagribisnis54/files/2012/07/penguatan-ketahanan-pangan-daerah.pdf>
- Danil, K. N. (2024). *Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri. <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/16682>
- Dewan Ketahanan Pangan. (2009). Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2006 – 2009. *Gizi dan Pangan*, 1(1), 57–63
- Ilham, N., Siregar, H., & Priyarsono, D. S. (2016). Efektivitas Kebijakan Harga Pangan terhadap Ketahanan Pangan. *Jurnal Agro Ekonomi*, 24(2), 157. <https://doi.org/10.21082/jae.v24n2.2006.157-177>
- Kurnia, A. W., Sundari, S., dan Purwanto, D. A. (2020). Implementasi Kebijakan Cadangan Pangan Nasional dalam Kondisi Keadaan Darurat di Badan Ketahanan Pangan guna Mendukung Pertahanan Negara. *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 6(1), <https://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/MP/article/view/593>
- Purwaningsih, Y. (2008). Ketahanan Pangan: Situasi, Permasalahan, Kebijakan, dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan*, 9(1), 1. <https://doi.org/10.23917/jep.v9i1.1028>
- Saliem, H. P., & Ariani, M. (2016). Ketahanan Pangan, Konsep, Pengukuran dan Strategi. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 20(1), 12. <https://doi.org/10.21082/fae.v20n1.2002.12-24>